BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa berdasarkan aspek perencanaan melibatkan berbagai unsur masyarakat mencerminkan pendekatan *bottom-up*. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya partisipasi dan lemahnya kapasitas perencana menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan agar perencanaan desa lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan dana desa berdasarkan aspek pelaksanaan mencerminkan upaya akuntabel dan transparan melalui pengawasan berjenjang, monitoring-evaluasi terbuka, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan. Namun, tantangan seperti keterbatasan kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat yang masih rendah, serta hambatan teknis dan logistik, menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan manajemen risiko yang adaptif.
3. Pengelolaan dana desa berdasarkan aspek penatausahaan dilakukan dengan komitmen menaati regulasi dan transparansi melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang sistematis. Namun, keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur digital, dan kelengkapan dokumentasi menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola masih perlu ditingkatkan. Penguatan sistem informasi, pelatihan aparatur, dan perbaikan sarana pendukung menjadi kunci menuju administrasi desa yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

4. Pengelolaan dana desa berdasarkan aspek pelaporan dilakukan secara berjenjang dan terbuka, mencakup evaluasi internal oleh pengelola, validasi oleh Kepala Kampung, serta pengawasan oleh BAPERKAM dan lembaga eksternal. Selain itu, penyusunan laporan melibatkan komunikasi dua arah dan mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, efektivitas pelaporan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, digitalisasi pelaporan, dan perluasan akses informasi publik guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang etis dan partisipatif.
5. Pengelolaan dana desa berdasarkan aspek pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang melalui sistem digital (SISKEUDES) dan fisik, serta diawasi oleh lembaga formal seperti Inspektorat dan BPK. Partisipasi aktif BAPERKAM dan keterlibatan masyarakat melalui forum terbuka memperkuat dimensi akuntabilitas horizontal. Namun, masih diperhadapkan dengan masih rendahnya kapasitas aparatur atau pengelola khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, dan dukungan infrastruktur digital kampung untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, responsif, dan etis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kampung Moswaren perlu mengoptimalkan forum musyawarah dan pelatihan partisipatif guna mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam

setiap tahap perencanaan, serta memperkuat kelembagaan desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan secara berkelanjutan.

2. Perlunya dilakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kampung Moswaren terkait manajemen keuangan, pengawasan, dan pelaksanaan program, guna mengatasi keterbatasan kapasitas dan meningkatkan kualitas tata kelola secara menyeluruh.
3. Perlunya pengembangan sistem informasi dan infrastruktur digital sistem penatausahaan dan pelaporan melalui peningkatan akses teknologi, penguatan jaringan internet, serta integrasi dengan aplikasi resmi seperti SISKEUDES, guna mendukung efisiensi dan transparansi.
4. Perlunya dikembangkan mekanisme komunikasi dua arah melalui forum warga, papan informasi digital, dan media sosial desa untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi pelaporan dan pertanggungjawaban secara terbuka dan real time.
5. Perlunya dilakukan perluasan ruang partisipasi masyarakat serta sinergi dengan lembaga pengawasan internal dan eksternal harus terus diperkuat guna memastikan proses pertanggungjawaban berjalan transparan, etis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Produk Tesis

Hasil penelitian ini akan disusun lebih lanjut menjadi karya ilmiah lainnya dalam bentuk *Policy Brief*. Hal tersebut agar tesis ini memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan dirumuskan oleh pemangku kebijakan guna mendorong perbaikan tata kelola dana desa secara etis dan berkelanjutan di Kampung Moswaren.